



h.3
Capaian Permampu

h.11
FKPAR



h.16
FMS



h.25
Galeri Foto





Suara PERMAMPU

Perempuan Sumatra, Otonom, Sehat, Kreatif

Pemimpin Redaksi
Sekretaris Redaksi
Editor Tulisan
Editor Foto

Dina Lumbantobing
King Ronald Silalahi
Dina Lumbantobing
Ronal Alexander

Kontributor

Layout
Distribusi

Direktur Eksekutif,
Koord. Program
Staf Lapang Lembaga Anggota
Ronal Alexander
Ronal Alexander

Sekretariat PERMAMPU

Jl. Letjen. Jamin Ginting KM 8 No. 282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara
Telp/Fax. 061-8361102 | e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com
www.permampu.org | Facebook: PermampuConsortium

Perempuan Sumatra Otonom, Sehat, Kreatif

Inilah slogan Permampu, yang menunjukkan arah perjuangan yang diharapkan melalui Program kita. Yaitu mandiri dalam mengambil keputusan; tubuh, pikiran dan semangat, sehat; serta mempunyai daya cipta, berkreasi di sepanjang umurnya.

Di semester I tahun 2017 ini, Permampu semakin mempertajam programnya dengan melihat masalah yang ada di masyarakat, serta mendengarkan masukan dari Pemerintah. Oleh karenanya Permampu sedang dalam tahap akhir pelaksanaan Survey mengenai Masalah Pemenuhan Gizi Perempuan dan Perempuan Muda. Laporan lengkap ringkas mengenai survey ini akan kami sampaikan di Newsletter akhir tahun.

Sementara itu, seluruh kegiatan yang dilaksanakan serta capaian per akhir Juni 2017, dapat ditemukan di bagian awal dari Newsletter ini. Sejak dari perkembangan pengorganisasian kelompok perempuan secara ekonomi, pengetahuan, kesadaran kritis akan hak dan posisinya sebagai perempuan; serta kebersamaan perempuan secara kolektif untuk menyuarakan kepentingannya melalui FKPAR dan FMS.

Aspek keberlanjutan Permampu telah semakin disempurnakan di tingkat konsep, dimana ke depan akan mulai menggagas dan melaksanakan penggalan sumberdaya dan dana untuk dapat membiayai gerakan perempuan yang lebih luas, serta mengembangkan kerelawanan untuk terlibat di dalam gerakan perempuan. Secara khusus gagasan untuk memulai usaha untuk melayani dan menguatkan perempuan lansia telah semakin disempurnakan.

Manajemen Permampu juga meningkat, baik untuk mengelola keuangan maupun personil yang merupakan roda penggerak utama lembaga. Hal ini diperkuat dengan adanya Pedoman Perilaku yang terus menerus dididik dan dilaksanakan di semua lembaga.

Dengan capaian di semester ini, diharapkan Permampu yang sudah mulai memasuki tahap BERSUARA dan MEMPENGARUHI KEBIJAKAN di semua ranah (keluarga, adat, sampai ke Negara) untuk dapat mencapai tujuan dari Program ini.

Selamat menjalani bulan-bulan terakhir 2017.

Waktu berlari cepat, kita juga harus bergerak lebih cepat lagi.

Salam solidaritas,

Dina Lumbantobing
Koordinator Konsorsium Permampu

Daftar Isi

- 1 Editorial
- 2 Salam Redaksi
- 3 Akuntabilitas
- 11 FKPAR
- 16 FMS
- 21 Cerita Perubahan
- 25 Galeri Foto

MAMPU

Maju Perempuan Indonesia
untuk Penanggulangan Kemiskinan



Capaian Permampu

Periode 1 Januari 2017 s/d 30 Juni 2017

Dalam periode enam bulan ini, Konsorsium Permampu telah melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari Rencana Kerja Tahunan untuk 2017. Adapun indicator capaian untuk semester ini adalah sebagai berikut:

Indikator	Jumlah	Jumlah Anggota	
		Perempuan	Laki-laki
1. Jumlah kelompok ekonomi Jumlah kelompok (unit) Total saham Total pinjaman beredar	461 Rp. 31.965.268.910 Rp. 35.623.765.038	18.527	0
2. Jumlah Perempuan korban KTP ditangani langsung	114 Kasus	114	0
3. Jumlah Perempuan Muda difasilitasi	1.977	1.977	0
4. Jumlah kader perempuan aktif	35 Kab/Kota	1.406	0
5. Terbentuk FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumpun) di tingkat Kabupaten/Kota	26 Kab/Kota	21.314	0
6. Terbentuk FMS (Forum Multi Stakeholder) di 29 Kab/Kota (kab, pr, lk)	26 Kab/Kota	328	217
7. Jumlah suami/ayah & laki-laki muda difasilitasi	233 (suami) 210 (laki-laki muda)	0	443
8. Jumlah Femokrat (Perempuan Peka Gender di Birokrat/Pejabat Publik	20 Kab/Kota	261	0
9. Jumlah perempuan difasilitasi mengakses layanan kesehatan	22 Kab/Kota	2.108	0

Dalam Lokakarya Review Permampu pada tanggal 21 Juli 2017 lalu, secara partisipatoris seluruh peserta yang terdiri dari 20 orang (8 Pimpinan, 8 Koordinator Keuangan, 1 Host, 1 Koordinator Permampu, 2 Pengawas dan 1 Pengurus), sepakat bahwa capaian yang paling membanggakan dalam semester ini bahkan termasuk semester lalu adalah:

1. Meningkatnya kekuatan ekonomi kelompok perempuan. Pendampingan kelompok ekonomi perempuan baik melalui CU, Koperasi secara regular serta pelatihan kewirausahaan bagi anggota semakin memperkuat permodalan dan

usaha perempuan akar rumput. Usaha khas perempuan seperti pangan semakin ditekuni sebagai usaha yang serius, demikian juga dengan usaha dagang dan pertanian. Secara khusus terdapat juga kelompok perempuan yang memproduksi tenunan khas suku-suku yang menggunakan pewarna alam seperti di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.

2. Lahirnya kebijakan yang mendukung HKSR & perempuan serta anak sebagai hasil lobi dan advokasi. Secara khusus ini ditandai dengan adanya langkah untuk drafting sampai ke alokasi dana dalam APBD dan APBDes seperti yang

dapat dilihat dalam contoh berikut:

- Mengawal proses legal **drafting penyusunan naskah akademik Perwal di Kab. Aceh Utara** tentang Qanun tentang Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak (KIBBLA)
- **Nota Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat** untuk melakukan Program Pengembangan Kapasitas, Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas. Dalam kesepakatan tersebut diuraikan tugas dan tanggungjawab antara Bidan Desa dan Dukun Beranak dalam membantu persalinan di 10 desa lokasi program kesehatan perempuan. Diharapkan MoU ini dapat meningkatkan peran Pembatras untuk mendukung pelayanan kesehatan reproduksi berkualitas bagi perempuan khususnya di daerah pedesaan yang masih terbatas fasilitas dan tenaga.
- **Nota Kesepahaman dengan Dinas Kesehatan Kab. Dairi** untuk melaksanakan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas di dua Puskesmas Batang Beruh dan Puskesmas Gunung Sitember. MoU ini diharapkan dapat meningkatkan mengefektifkan umpan balik dari masyarakat agar puskesmas dapat menyediakan layanan kesehatan reproduksi dan seksualitas yang berkualitas bagi masyarakat.
- **Enam desa di Bengkulu yakni Desa Sumber Urip kab. Rejang Lebong mengajukan dana desa sebesar Rp 30.000.000 untuk penanganan dan pendampingan korban KtPA dan tes IVA, Desa Talang Tinggi Kab. Seluma** mengalokasikan dana desa sebesar Rp 15.000.000 untuk pengadaan makanan tambahan, penyuluhan tentang kanker serviks, narkoba, dan kesehatan reproduksi, pengadaan ginbet, dan pemanfaatan toga; **Desa Purbosari Kab. Seluma mengalokasikan dana desa sebesar Rp 31.000.000** untuk pemberdayaan posyandu, Bina Keluarga Balita, pembinaan organisasi perempuan di wilayah desa; **Desa Lubuk Lagan Kab. Seluma** mengalokasikan dana desa sebesar Rp 12.000.000 untuk pembelian tensi,

pemberian makanan tambahan dan honor kader posyandu balita dan lansia; **Desa Sidoluhur kab. Seluma** mengalokasikan dana desa sebesar Rp 200.000.000 untuk pembangunan posyandu dan pembelian fasilitas kesehatan; dan **Desa Padang Kuas kab. Seluma** mengalokasikan dana desa sebesar Rp 20.000.000 untuk pemberian makanan tambahan, pembelian fasilitas posyandu dan honor kader posyandu.

- **Mengawal Draft Peraturan Wali Kota tentang pembinaan dan perlindungan anak di Kota Padang** dan Rancangan Perna (Peraturan Nagari) tentang perlindungan perempuan dan anak di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

- **Perjanjian kerjasama dengan SMA Negeri 5 Merangin** tentang Penyelenggaraan Pendidikan Penyadaran Kesetaraan Gender.

- **Kesepakatan Bersama (MoU) Pelayanan Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Wilayah di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang.**

- Alokasi dana desa (Desa Purwodadi dan Desa Sidodadi, Kab. Lampung Tengah) mengalokasikan anggaran 25 juta untuk posyandu dan pengadaan alat pemanggangan kue bagi usaha perempuan

3. Meningkatnya akses perempuan terhadap layanan di Puskesmas terutama dalam pelayanan tes IVA. Pada periode ini, lembaga penyedia layanan kesehatan semakin meningkatkan kegiatan penyuluhan dan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan seperti informasi kanker serviks, kanker payudara dan melakukan IVA test. Lembaga pendamping dibantu FMS terus mengupayakan adanya kerjasama dengan Dinas kesehatan/puskesmas sebagai piloting dalam pelaksanaan sistem pengaduan masyarakat dan penyediaan layanan kesehatan reproduksi dan keterlibatan Pembatras. Di internal Perampu pun terus meningkatkan pemahaman tentang konsep One Stop Service & Learning



(OSS&L) sebagai unit penyedia layanan kesehatan seksualitas dan reproduksi untuk jangkauan yang lebih luas dan mengakar. Di berbagai daerah Permampu aktif terlibat dalam gerakan bersama masyarakat sipil, kelompok perempuan dan dinas/instansi mengkampanyekan HKSR khususnya pencegahan kanker serviks dan kanker payudara, seperti Jambi, Pekanbaru, dan lain-lain sehingga meningkat signifikan perempuan yang bersedia melakukan test IVA.

4. Keterlibatan tokoh agama, tokoh adat serta kader laki-laki menjadi salah satu peringkat tinggi yang dibanggakan. Hingga akhir Juni 2017 terdapat 196 orang tokoh agama, tokoh adat dan kader laki-laki yang terlibat dalam pendidikan dan advokasi HKSR seperti di Kab. Aceh Utara dimana mereka berpartisipasi dalam mendorong qanun tentang KIBBLA, di Bengkulu mereka mendukung usulan FKPAR di dalam Rapat Musrembang (dana desa), di Sumatera Utara tokoh agama aktif melakukan penyadaran melalui konseling pra pernikahan, dan lain sebagainya.
5. Meningkatnya pengakuan dan kemitraan dari dan dengan Pemerintah di pedesaan dan Kabupaten merupakan salah satu capaian yang sangat penting, karena ini sangat mendukung keberhasilan dari seluruh program HKSR. Pemerintah desa semakin terbuka dengan aspirasi yang disampaikan FKPAR dan FMS dalam forum rapat desa terkait program kesehatan seksualitas dan reproduksi. Meningkatnya alokasi dana desa menjadi peluang untuk mengadvokasi anggaran desa agar responsive terhadap isu HKSR. Beberapa pemerintah daerah sudah mengajak lembaga PERMAMPU untuk ikut memberikan masukan penyusunan kebijakan/perda yang terkait dengan isu gender dan HKSR. Selain itu, survey GIzi Perempuan dan Perempuan Muda yang dilakukan oleh PERMAMPU secara partisipatif telah mendorong meningkatnya perhatian Pemerintah Daerah untuk aktif merespon masalah HKSR di wilayah kerjanya. FMS pun antusias terlibat dalam penelitian dan menjadi focal point di

lembaganya untuk mengarusutamakan isu HKSR dalam program instansinya. Besar harapan data dari survey akan menjadi dasar penting untuk Advokasi Kebijakan di 8 propinsi dampingan Permampu.

Peningkatan kapasitas lembaga juga menjadi salah satu capaian yang membanggakan. Selain karena secara pengelolaan harian seluruh personil memperoleh dan mengasah point pembelajaran, dalam semester ini, PERMAMPU sebagai Konsorsium juga melakukan berbagai kegiatan untuk perbaikan manajemen lembaga, peningkatan kapasitas dan membangun integritas semua personil, yaitu:

1. **Sales Pitch untuk Keberlanjutan Permampu (25-26 Januari 2017)** di Jakarta, yang diikuti oleh Ramida Sinaga (Host Permampu), Lusi Herlina (Pengawas Permampu) dan Elpina Sipayung (Grant Manager Permampu). Kegiatan ini dimaksudkan untuk membantu Konsorsium dalam menyajikan pikiran atau gagasannya untuk mengembangkan dokumen keberlanjutan Permampu. Permampu difasilitasi oleh MAMPU sebagai lembaga pendukung untuk merancang kegiatan yang dapat menjamin keberlanjutan Permampu, baik untuk keberlanjutan program, maupun keberlanjutannya sebagai sebuah organisasi penguatan perempuan. Mengenai rencana keberlanjutan ini akan kami sampaikan di newsletter mendatang, yang pada dasarnya akan melaksanakan usaha berjiwa social untuk perempuan lansia dan pasangannya, membangun kerelawanan dan melakukan pengumpulan dana untuk membiayai semua kegiatan.
2. **Rapat MANIS KITA (6 Februari) di Sekretariat Permampu - Medan**, yang dihadiri oleh personil Pesada sebagai Host (Ramida, Ronald, Berliana, Dina Lt) dan staff MONEV MAMPU (Didit) serta PEO MAMPU (Astrid Wijaya). MANIS KITA adalah singkatan untuk Management Information Sistem Kita (Kita=MAMPU). Ini adalah diskusi mengenai maksud dan cara memasukkan data-data Permampu secara online, sehingga semua mitra MAMPU bahkan public dapat mengakses data Permampu secara online dan transparan.
3. **Diskusi Hasil Penelitian Collective Action oleh Migunani (21 Februari 2017) di**

Yogyakarta, diikuti oleh Suljimah (APM Jambi) dan Dina Lt. (PERMAMPU). Hasil dari penelitian kualitatif ini menjelaskan apa aksi kolektif, bagaimana dan dalam kondisi apa keterlibatan perempuan dalam kelompok lokal yang diinisiasi oleh PERMAMPU/mitra MAMPU membawa perubahan positif pada individu dan pemberdayaan kolektif. Untuk Permampu, penelitian dilaksanakan di Merangin (wilayah dampingan APM Jambi).

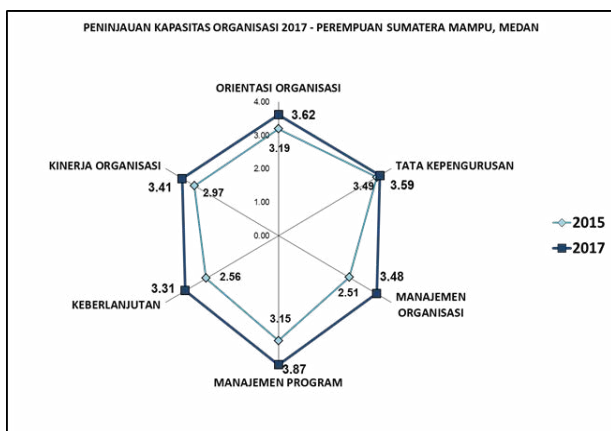
4. **Pendidikan Pedoman Perilaku Permampu** (16-17 April 2017) di Medan, diikuti oleh 8 Pimpinan lembaga anggota Permampu & 8 perwakilan Pengurus & Pengawas. Seluruh nilai-nilai Permampu dikritisi secara tajam, sekaligus untuk pendalaman makna. Pendidikan ini diikuti dengan Rencana Tindak Lanjut berupa penyusunan pedoman untuk tingkat lembaga serta langkah untuk pelaksanaannya.
5. **Persiapan Penelitian “Masalah Pemenuhan Gizi Perempuan dan Perempuan Muda di 8 Propinsi”** (17 April 2017) di Medan, yang diikuti oleh 8 Pimpinan Lembaga Anggota Permampu, beserta Koordinator dan Penanggung Jawab Penelitian. Persiapan ini memutuskan cakupan wilayah penelitian, waktu, dan anggaran. Penelitian saat ini sedang dalam masa penulisan laporan, yang akan dilaporkan secara khusus dalam Newsletter mendatang.
6. **Lokakarya Peninjauan Kapasitas Kelembagaan/OCPAT Konsorsium Permampu (19-20 April 2017)** di Medan, 15 orang peserta yang seluruhnya adalah

dan Pengawas. Kegiatan refleksi kelembagaan Konsorsium PERMAMPU menggunakan Organizational Capacity Performance and Assessment Tools (OCPAT) yang kedua, dua tahun setelah pelaksanaan refleksi kelembagaan di Bulan April 2015. Sebagai fasilitator lokakarya adalah tim dari YAPPIKA, yaitu: Hendrik Rosdinar dan Abdi Suryaningati. Lokakarya dilakukan dalam empat sesi yaitu: Penjelasan tujuan dan tahapan pengkajian yang dibuat secara singkat mengingat lokakarya kali ini adalah lokakarya kedua;

- Pembahasan 6 komponen organisasi (orientasi organisasi, tata kepengurusan, manajemen organisasi, manajemen program, keberlanjutan dan kinerja organisasi) yang dimulai dengan meninjau kembali rekomendasi-rekomendasi yang dibuat di tahun 2015;
- Perumusan rekomendasi prioritas; dan
- Evaluasi kegiatan. Selain lokakarya, dilakukan pula interview dengan beberapa stakeholders kunci dan penerima manfaat dalam rangka mencari informasi pembandingan dari temuan-temuan dalam lokakarya.

Berdasarkan evaluasi peserta menunjukkan jika secara umum keempat tujuan kegiatan tercapai dengan sangat baik dan baik, tidak ada satupun peserta yang merasa kurang tercapai atau tidak tercapai. Sebanyak 30,77% peserta merasa tujuan kegiatan untuk mendapatkan data dasar perubahan kapasitas kelembagaan sepenuhnya tercapai dan 61,54% tercapai. Sementara untuk tujuan kedua yaitu mendapatkan gambaran faktor internal dan eksternal yang memicu perubahan kapasitas organisasi, sebanyak 7,69% peserta merasa sepenuhnya tercapai dan 92,31% menyatakan tercapai. Sebanyak 23,08% peserta merasa tujuan ketiga yaitu memperoleh gambaran kapasitas mitra dalam peningkatan kapasitas bagi submitra sepenuhnya tercapai dan 76,92% menyatakan tercapai. Tujuan kegiatan untuk menghasilkan rekomendasi sebagai dasar pengembangan kapasitas kelembagaan sepenuhnya tercapai (30,77%) dan tercapai (69,23%).

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan dalam refleksi tahun 2015 telah dijalankan dan memberikan pengaruh perubahan



perempuan. Peserta tersebut terdiri dari unsur Direktur/Perwakilan Organisasi Anggota (8 orang), Penanggung Jawab (Host), Koordinator Pelaksana, Pengurus

pada organisasi dalam dua tahun terakhir. Tidak ada perubahan terhadap kebijakan organisasi (tertulis) yang terkait dengan orientasi organisasi. Perubahan terbesar yang terjadi di komponen ini adalah intensitas dan variasi metode internalisasi filosofi dan nilai organisasi; perluasan isu-isu strategis organisasi; dan adanya perubahan pada



Refleksi Kapasitas Kelembagaan Permampu

cara pandang serta posisi organisasi dalam relasinya dengan pemerintah dan DRPD. PERMAMPU semakin intensif menggunakan newsletter, sosial media, dan website, sekaligus memanfaatkan media masa seperti radio dan televisi untuk menginternalisasikan filosofi dan nilai organisasi perluasan isu-isu strategis organisasi; dan adanya perubahan pada cara pandang serta posisi organisasi dalam relasinya dengan pemerintah dan DRPD. PERMAMPU semakin intensif menggunakan newsletter, sosial media, dan website, sekaligus memanfaatkan media masa seperti radio dan televisi untuk menginternalisasikan filosofi dan nilai organisasi di lingkungan internal (staf dan kader komunitas) serta kampanye isu kepada publik dan para pihak kunci.

Dalam konteks tata kepengurusan, ada tiga perubahan utama yaitu perubahan struktur, mekanisme pengambilan keputusan, serta peningkatan praktik mekanisme transparansi dan akuntabilitas. PERMAMPU melakukan perubahan struktur organisasi dengan tujuan untuk memisahkan kewenangan penentu kebijakan, eksekutif dan pengawas. Perubahan struktur memicu perubahan-perubahan penting organisasi, seperti makin cepatnya proses regenerasi kepemimpinan, meningkatnya peran second layer untuk

mengimplementasikan kerja-kerja organisasi, dan makin jelasnya organ (pengawas) yang mengelola internalisasi nilai dan pedoman perilaku di level konsorsium. Pengambilan keputusan, di sisi lain, menjadi lebih partisipatif dan cepat, terutama dipengaruhi oleh penggunaan keragaman teknologi informasi yang digunakan.

Kemajuan paling penting di komponen manajemen organisasi terletak pada pengelolaan SDM, pengelolaan informasi, dan pengelolaan keuangan. Ada peningkatan signifikan dalam hal pengembangan kapasitas SDM di semua tingkatan organisasi hingga kelompok-kelompok dampingan (kader), sehingga kelompok-kelompok masyarakat dampingan pun mulai mampu berinteraksi dan berkomunikasi dengan aparatur pemerintah.

Manajemen pengelolaan keuangan PERMAMPU dan organisasi anggota mengalami kemajuan signifikan. PIA (Participatory Internal Audit) menjadi instrumen penting dan sangat membantu melihat pada diri sendiri soal akuntabilitas pemanfaatan dana organisasi. PIA juga mampu mendorong organisasi anggota untuk memperbaiki SOP masing-masing di samping beberapa kali kegiatan induksi (pelatihan dan asistensi) keuangan yang diikuti oleh Direktur dan Koordinator Program oleh organisasi Host. Dalam dua tahun ini semua organisasi anggota telah diaudit keuangan.

Ketiga subkomponen dalam manajemen program mengalami perkembangan, dan pelibatan penerima manfaat merupakan subkomponen yang mengalami perkembangan signifikan dalam dua tahun terakhir. Keterlibatan kader komunitas dalam kegiatan terus meningkat dan variatif, dari sebagai panitia, fasilitator hingga narasumber. Bahkan beberapa kader sudah terlibat dalam kegiatan monev komunitas lainnya. Pelibatan kader dalam kegiatan monev sekaligus sebagai cara untuk mempercepat terjadinya pertukaran pengetahuan di antara komunitas. Di komponen keberlanjutan, kepercayaan dan legitimasi publik masih menjadi subkomponen terkuat dibandingkan dua yang lain. Tetapi jika dilihat dari tingkat perkembangannya dua komponen yang lain justru mengalami lonjakan yang signifikan.

Sebagai sebuah konsorsium, PERMAMPU telah menempuh langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan sumber pendanaan. Berangkat dari kesadaran tentang social entrepreneurship, PERMAMPU mengembangkan konsep Women Fund (WF), Women Welfare & Care (WWC) dan mengintegrasikan CU untuk mendukung penguatan ekonomi.

Di setiap organisasi anggota saat ini sudah membentuk CU personil sebagai upaya menjamin kesejahteraan staf di masa depan, termasuk untuk penguatan keberlanjutan serta perluasan program. Dampaknya memang belum maksimal, namun upaya-upaya ini menjadi bukti dari keseriusan konsorsium melanjutkan inisiatif bersama setelah MAMPU berakhir. Sebagai akibat dari seluruh perbaikan di tingkat kelembagaan di atas, kinerja PERMAMPU mengalami perkembangan pesat dalam dua tahun terakhir. Dalam pemberdayaan masyarakat, terjadi perkembangan baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas saat ini sudah ada 437 kelompok ekonomi perempuan di 8 provinsi wilayah kerja PERMAMPU dengan 17.857 anggota dan kurang lebih 31 milyar rupiah saham.

Secara kapasitas, komunitas dampingan mengalami peningkatan pesat, mereka telah mampu melakukan kerja-kerja advokasi seperti pendampingan kepada perempuan dan anak korban kekerasan; menjadi representasi kelompok perempuan dalam kegiatan musrenbang desa, dan mempengaruhi kebijakan di desa; dan banyak contoh lainnya. Kemandirian komunitas juga mulai menampakkan hasil secara ekonomi cukup kuat dengan adanya CU.

Pemberdayaan masyarakat juga sudah mulai menysar anak-anak muda. Seiring dengan tingkat legitimasi publik yang kuat, PERMAMPU juga mempunyai tingkat kepercayaan yang tinggi di hadapan masyarakat yang dilayani. Begitu banyak bukti kinerja yang membuktikan hal tersebut. Keberhasilan membangun komunitas yang kuat secara ekonomi melalui keberadaan CU adalah prestasi utama yang menjamin keberlanjutan kegiatan di komunitas. Secara lebih luas, terbentuknya FKPAR di 8 provinsi akan menjamin terus berjalannya kegiatan

komunitas bahkan akan terus meluas. Adanya dukungan APBDes untuk kegiatan komunitas menjadi jaminan paten bagi keberlanjutan kegiatan ke depan.

PERMAMPU sebagai konsorsium maupun setiap organisasi anggota aktif dalam menjalin kerja sama (jaringan) dengan OMS lain, atau koalisi-koalisi yang dibentuk. Keterlibatan ini ada dari tingkat kabupaten, regional Sumatera, nasional, maupun internasional. Kinerja PERMAMPU dan anggotanya dalam mendorong lahirnya kebijakan menuai sukses. Kebijakan dari tingkat desa hingga kabupaten berhasil diupayakan. Beberapa contoh tersebut antara lain adalah: di Banda Aceh berhasil menginisiasi Perwal Qibla, di Pekanbaru berhasil mendorong lahirnya SK Walikota untuk FMS peduli HKSR, lahirnya perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin dengan Aliansi Perempuan Merangin (APM) tentang Pemenuhan dan Pelayanan HKSR untuk Menekan AKI & AKB, serta adanya Nota Kesepahaman antara Perkumpulan Sada Ahmo (Pesada) dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi tentang Pengelolaan Sistem Pengaduan Pelayanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi Perempuan di Puskesmas Batang Beruh dan Puskesmas Gunung Sتمبر Kabupaten Dairi. Di tingkat desa, di Desa Sukasari-Langkat berhasil didorong lahirnya Perdes Perlindungan Perempuan dan Korban Kekerasan.

7. **Kunjungan Belajar ke PUSKESMAS Tebet Timur Dalam Jakarta** dan Diskusi Inovasi Permampu mengenai One Stop Service & Learning HKSR Perempuan di Kantor MAMPU (9 Juni 2017) diikuti oleh 7 Pimpinan Lembaga Anggota, 1 Host dan 1 Koordinator Permampu. Kegiatan ini menghasilkan beberapa perbaikan konsep dan target yang akan dicapai dalam pelaksanaan OSS&L, yang saat ini telah mulai dilakukan di Kab. Dairi melalui Meja Pengaduan Layanan Puskesmas.
8. **Training Media Handling (10 Juni 2017)** di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 7 Pimpinan Lembaga Anggota Permampu dan Host, yang membangun kapasitas peserta untuk menghadapi media, khususnya menarik perhatian



dan memelihara hubungan untuk promosi kegiatan dalam rangka pendidikan public.

9. **Forum Direktur Mitra MAMPU (12-13 Juni 2017)** di Jakarta, dihadiri oleh Pengawas (Lusi H.) dan Koordinator PERMAMPU (Dina Lt.). Acara ini mendiskusikan masukan dari Pemerintah (BAPPENAS) dan kesesuaian dengan RPJMN terhadap Program MAMPU serta penajaman Rencana Kerja.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERMAMPU

Dana masuk untuk kegiatan program dan operasional PERMAMPU tahun 2017 Rp 4.842.267.430,- Dana Corefund Januari – Maret 2017 sebesar Rp 190.266.592. Serapan dana keseluruhan program PERMAMPU 32 %. Pelaksanaan ini dipengaruhi adanya aturan pelaksanaan program dari MAMPU, selama tiga bulan pertama melakukan kegiatan rutin yang tidak melibatkan pihak eksternal. Serapan dana tertinggi dalam semester ini adalah dari Lembaga LP2M sebesar 46%, serapan dana terendah adalah 22% dari lembaga WCC Palembang.

Serapan dana secara rinci oleh 8 lembaga per Juni 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

NO	Lembaga	Budget		Realisasi		Sisa		%
		Program	Corefund	Program	Corefund	Program	Corefund	
1	Flower	809.620.000	157.841.000	246.538.219	22.617.179	563.081.781	135.223.821	30
2	Pesada	1.008.700.000	197.209.775	351.441.440	36.404.006	657.258.560	160.805.769	35
3	PPSW	670.805.000	133.590.000	174.079.593	15.277.542	496.725.407	118.312.458	26
4	LP2M	604.260.000	100.740.000	278.979.106	14.550.260	325.280.894	86.189.740	46
5	APM	622.650.000	123.357.000	194.838.931	20.178.820	427.811.069	103.178.180	31
6	Cahaya Perempuan	704.358.600	139.373.400	177.083.218	14.092.647	527.275.382	125.280.753	25
7	WCC Palembang	565.538.600	111.382.000	123.640.666	13.307.175	441.897.934	98.074.825	22
8	DAMAR	649.260.999	125.841.501	166.487.677	13.133.461	482.773.322	112.708.040	26
9	Host	1.046.782.000	208.690.725	439.156.334	40.705.502	607.625.666	167.985.223	42

Realisasi Anggaran Permampu
Periode Januari - Juni 2017



Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput (FKPAR)



☞ FKP PAR PROVINSI ACEH

FKPAR Aceh telah terbentuk di 12 kabupaten/kota yang terdiri dari kelompok dampingan Mitra MAMPU di Aceh (Flower Aceh-Perempuan; Pekka Aceh, KPI Wil. Aceh & LBH Apik-Komnas Perempuan). Berdasarkan pendataan ulang anggota FKP PAR di Banda Aceh, Pidie dan Aceh Utara terdapat 343 orang perempuan dan 100 anggota perempuan muda. Pendidikan kritis kesehatan seksualitas dan reproduksi yang berperspektif gender bagi perempuan akar rumput yang dilakukan setiap bulan telah meningkatkan kesadaran diri perempuan untuk memeriksa kesehatan (IVA test dan Papsmear), memahami hak atas gizi bagi perempuan dan masalah stunting.

FKPAR sudah mulai bergerak melakukan aksi dan kampanye bersama baik di level desa hingga propinsi dalam mengkampanyekankan perbaikan pelayanan kesehatan seperti pengaduan pelayanan



Dok. Flower Aceh

BPJS Kesehatan, anggota FKP PAR di Kab. Aceh Utara terlibat dalam mengawal proses legislasi Qanun KIBBLA. Pada bulan April 2017, FKP PAR melakukan pertemuan rutin Mitra MAMPU & PEDULI di Aceh (Flower Aceh, Pekka Aceh, KPI Wil. Aceh, LBH Apik Aceh, PKBI Aceh, RPUK & Lakpesdam NU Aceh) yang membahas kampanye IWD 2017, advokasi layanan BPJS, kampanye pengesahan RUU PKS, dan pendataan program bantuan sosial. Selain itu, FKP PAR juga ikut dalam aksi bersama menggalang bantuan kemanusiaan untuk korban gempa Pidie Jaya.

☞ FKP PAR PROVINSI SUMATERA UTARA

FKPAR di Propinsi Sumatera Utara merayakan

Hari Perempuan Sedunia bersama seluruh Mitra MAMPU (PEKKA SUMUT, BITRA, HAPSARI, SPI Labuhan Batu) dan aktivis perempuan dengan teman “ Mendesak Negara (Hukum dan APH) untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan” pada tanggal 13 Maret di Medan. Kegiatan ini merupakan aksi kolektif yang bertujuan agar peserta menyadari tingginya angka kekerasan terutama kekerasan seksual yang terjadi di sekitar, dan tumbuhnya kesadaran



Aksi damai menuntut komitmen Pemda memenuhi pendidikan bagi perempuan - Pesada

untuk mendesak pemerintah untuk menindak tegas pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kegiatan ini diikuti oleh 130an peserta.

Selain itu, FKP PAR dampingan Pesada dari 3 Kabupaten mengikuti kegiatan Perayaan Hari Pendidikan dan Peringatan Hari Kartini di Tapanuli Tengah melalui Semiloka dan Aksi Damai yang bertemakan “Inspirasi Kartini untuk Persamaan Hak Perempuan memperoleh Akses Ke-Pendidikan Seumur Hidup” pada tanggal 2 Mei 2017 di Pandan, Kab. Tapanuli Tengah. Dalam semiloka tersebut terungkap bahwa masih banyak masalah yang terkait dengan rendahnya akses pendidikan bagi perempuan, kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak perempuan, masih terbatasnya pelayanan kesehatan reproduksi dan seksualitas, dan belum maksimalnya program dan kelembagaan pemberdayaan perempuan di Kab. Tapanuli Tengah. Setelah selesai mengikuti semiloka, FKP PAR melanjutkan aksi long march ke Polres, Kantor Bupati dan Kantor DPRD Kab. Tapanuli Tengah untuk menyampaikan tuntutan perempuan. Pada tanggal 13 Mei 2017 dilaksanakan diskusi kritis dan aksi pendidikan public “Refleksi Kritis Terhadap Praktek Demokrasi dan Keberagaman-Pembelajaran dari PILKADA DKI Jakarta & Proses Hukum Basuki



Tjahaya Purnama”. Acara ini dilakukan secara parallel di Gunung Sitoli yang diikuti oleh anggota FKPAR di Pulau Nias dan di Sidikalang yang diikuti oleh anggota FKPAR di Dairi, Pakpak Bharat, Tapteng, Sibolga, Humbahas, Medan/Langkat. Pendidikan publik ini bertujuan untuk melakukan pemahaman kritis terhadap isu-isu yang berkembang dalam politik pilkada DKI dan proses hukum Ahok, meningkatkan perspektif gender dan pluralisme sebagai kesadaran kritis menyikapi politik identitas, dan mengkampanyekan nilai-nilai kebhinekaan dan pentingnya politik rasional dalam berpolitik terutama menyambut Pilkada di Sumatera Utara.

⌘ FKPAR PROVINSI RIAU

Pertemuan tahunan FKPAR tingkat kabupaten diikuti oleh pengurus dan anggota FKPAR Pekanbaru, Rokan Hilir dan Riau. Pertemuan ini bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional Tahun 2017, yang diisi dengan diskusi kritis mengenai gerakan perempuan di Indonesia dan Internasional. Pertemuan FKPAR ini menghasilkan rencana kerja target wilayah untuk penambahan kelompok perempuan di beberapa kelurahan di Kota Pekanbaru.

Pada 19 Maret 2017, FKPAR di Kab. Rokan Hilir melakukan aksi kolektif dengan kelompok perempuan lainnya di Rokan Hilir berlokasi di Car Free Day Jl. Merdeka. Aksi kolektif ini diisi dengan acara senam sehat, orasi, teatrikal dan nyanyian Three-End. Aksi kolektif ini mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kab. Rokan Hilir.



Dok. PPSW Riau

Pada tanggal 19-20 Juni 2017, telah terlaksana pembentukan FKPAR tingkat Kabupaten Kampar di Bangkinang. Lokakarya disepakati terbentuknya FKPAR Kabupaten Kampar dan Ketua FKPAR Kab. Kampar terpilih adalah Leni Marlina. Tujuan pembentukan FKPAR adalah untuk membangun gerakan perempuan akar rumput menjadi lebih

kuat dan lebih memahami persoalan-persoalan perempuan baik yang terkait kesehatan secara umum, kesehatan reproduksi, kemiskinan dan hak-hak politik perempuan.

⌘ FKPAR PROVINSI SUMBAR

Pertemuan FKPAR dilaksanakan pada 20 Maret 2017 dengan agenda evaluasi kegiatan dan persiapan aksi bersama pada bulan April mendatang. Pertemuan ini menyepakati bahwa pertemuan FKPAR adalah juga pertemuan APUK, melakukan aksi dan dialog bersama dinas/instansi terkait isu HKSR.

Pada tanggal 27 April 2017, FKPAR Sumatera



Dok. LP2M Padang

Barat berpartisipasi dalam Dialog Bersama dengan para pihak membahas upaya pemenuhan dan perlindungan hak kesehatan seksual dan reproduksi di tiga kabupaten/kota, yaitu Padang, Padang Pariaman dan Tanah Datar. Aksi Bersama ini dilakukan dalam memperingati Hari Kartini. Acara terdiri dari penampilan seni dari CO/kader lokal (menyanyikan Lagu Kartini dan membaca puisi), presentasi kegiatan kelompok di tingkat nagari/kelurahan hingga provinsi, pameran foto kegiatan dan hasil kerajinan kelompok perempuan usaha kecil, serta dialog mendorong kebijakan tentang pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak di tiga kabupaten/kota.

(Insert photo aksi bersama).

Anggota FKPAR di Sumatera Barat juga aktif berperan sebagai kader (community organizer) baik di kelompok perempuan maupun dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka dipercaya untuk mengelola Program Dasawisma dan Program Sanitasi Perkotaan Berbasis Masyarakat (SPBM) bekerjasama dengan instansi terkait. Diantara pada kader tersebut bahkan diakui kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat dengan mendapatkan penghargaan dari Bupati kab. Tanah Datar dan penghargaan sebagai pejuang keadilan sumberdaya alam yang diselenggarakan oleh Lembaga Q-Bar.

☞ FKPAR PROVINSI JAMBI

FKPAR di Kab. Merangin dan Jambi melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan FKPAR melalui berbagai moment hari perempuan seperti Hari Kartini, Hari Perempuan, dan lain-lain. APM melakukan pendampingan pertemuan pengurus FKPAR setiap tiga bulan. Pertemuan ini adalah media untuk peningkatan kapasitas dan memperkuat keberadaan FKPAR Jambi.

Dalam rangka memperingati Perayaan IWD 2017, FKPAR (APM dan KPI) menyelenggarakan diskusi bertepatan “Bersatu Menyatukan Tekad Untuk Meningkatkan Kapasitas dan Sumber Daya Kelembagaan Aliansi Perempuan Merangin (APM)”. Pertemuan ini sebagai arena memperkuat eksistensi organisasi perempuan menjadi wadah perjuangan



Pencanangan gerakan tes IVA di Merangin

dalam upaya menghapus kekerasan dan diskriminasi. APM Jambi dan FKPAR Propinsi Jambi aktif terlibat dalam Gerakan Tes IVA di Kab. Merangin bersama-sama dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, TP-PKK kabupaten Merangin, IDI, IBI, GOW, Puskesmas Bangko, Puskesmas Pematang Kandis, Panitia peringatan hari Kartini ke-138 Kab.Merangin, dan Dinas PPKB Kab. Merangin. Gerakan ini bertujuan untuk menekan tingkat prevalensi kanker serviks karena Kabupaten Merangin termasuk daerah yang paling rendah keikutsertaan dalam tes IVA di Propinsi Jambi. Dalam rangka peringatan Hari Kartini pada tanggal 21-27 April 2017, Aksi Gerakan Tes IVA telah berhasil mengkampanyekan pentingnya tes IVA kepada perempuan dan melayani tes IVA secara gratis kepada 1300 orang.

☞ FKPAR PROVINSI BENGKULU

Dalam musrembang desa pada tahun 2017, FKPAR Propinsi Bengkulu didampingi CPWCC berpartisipasi memperjuangkan alokasi dana desa untuk tahun 2017.

Adapun desa yang bersedia menganggarkan yakni Desa Sumber Urip Kab. Rejang Lebong (Rp 30.000.000 untuk penanganan dan pendampingan korban KtPA dan tes IVA); Desa Talang Tinggi (Rp 15.000.000 untuk pengadaan makanan tambahan, penyuluhan tentang kanker serviks, narkoba, dan kesehatan reproduksi, pengadaan ginbet, dan pemanfaatan toga); Desa Purbosari mengalokasikan dana desa sebesar Rp 31.000.000 untuk pemberdayaan posyandu, Bina Keluarga Balita, pembinaan organisasi perempuan di wilayah desa; Desa Lubuk Lagan Kab.Seluma (Rp 12.000.000 untuk pembelian tensi, pemberian makanan tambahan dan honor kader posyandu balita dan lansia; Desa Sidoluhur Kab. Seluma (Rp



Diskusi kelompok baru “Fatima

200.000.000 untuk pembangunan posyandu dan pembelian fasilitas kesehatan); Desa Padang Kuas Kab. Seluma (Rp 20.000.000 untuk pemberian makanan tambahan, pembelian fasilitas posyandu dan honor kader posyandu).

☞ FKPAR PROVINSI SUMSEL

Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional tahun 2017, FKPAR Propinsi Sumatera Selatan mengikuti kegiatan Jambore Kelompok Dampingan WCC Palembang yang bertema “Perempuan Bersatu untuk Perubahan dan Melawan Pemiskinan” di Hotel Amaris dan di Hutan Wisata Pundi Kayu. Acara ini bertujuan untuk



Jambore Kelompok - WCC Palembang

mereview perkembangan kelompok, membangun kebersamaan melalui nyanyian, pantun, puisi, dll. Di akhir acara dilakukan konferensi pers dimana salah satu anggota FKPAR menjadi narasumber.

⌘ FKPAR PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka memperingati IWD 8 Maret 2017 dan Kampanye Perempuan Melawan Segala Bentuk Penindasan (14 Februari 2017), Gerakan Perempuan Lampung (FKPAR Lampung) bersama-sama dengan jaringan organisasi perempuan seperti Muslimat NU, Jaringan Masyarakat Menentang Perdagangan Orang (JMMPO) melakukan kampanye publik isu kesehatan seksualitas dan reproduksi dan hak-hak asasi perempuan. Selain itu, dalam jaringan masyarakat sipil, FKPAR juga turut dalam Gerakan Perempuan Lampung melakukan pembelaan atas kriminalisasi perjuangan petani untuk mempertahankan hak atas tanahnya di Pengadilan Negeri Menggala. (Pembelaan terhadap Pendeta Sugianto, Sukirman dan Sukirji; Sujarno dan Hasan atas Fasilitas Tahapan Aksi Komunitas Serikat Tani Korban Gusuran PT BNIL).

Peluang dan tantangan UU Desa bagi pemberdayaan perempuan di desa menjadi hal penting untuk dipahami oleh anggota FKPAR. Untuk itu, FKPAR Propinsi dan DAMAR menyelenggarakan lokakarya kajian kebijakan pengelolaan dana desa pada 4-5 Maret 2017 yang dihadiri oleh anggota FKPAR Tanggamus dan FKPAR Lampung Timur. Lokakarya ini diharapkan dapat meningkatkan kepemimpinan perempuan akar rumput dalam melakukan advokasi dan pengawasan kebijakan desa/daerah.

Dok. DAMAR



Forum Multi Stakeholder (FMS)



☞ FMS ACEH

Pada periode ini, FMS Aceh melakukan diskusi kelompok terfokus tentang upaya-upaya untuk mendorong adanya kebijakan yang terkait dengan kesehatan reproduksi dan perbaikan layanan kesehatan khususnya di Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Utara. FGD ini melibatkan berbagai instansi seperti Dinas Kesehatan, DPMG, Bappeda, Dinas PP & KB, Tokoh Masyarakat, dan FKPAR. FMS terus aktif aktif mendorong agar Bappeda Kota Banda Aceh memasukkan isu gender dalam rancangan kebijakan perencanaan pembangunan yang inklusif, mendorong dibahasnya kebijakan Kibla di Aceh Utara dan mendorong adanya rancangan peraturan desa tentang HKSR di Kab. Pidie.

Secara khusus di Kab. Aceh Utara, FMS bersama dengan tim Flower Aceh ikut mengawal proses legislasi rancangan Qanun tentang KIBBLA Kab. Aceh Utara. Saat ini tahap legislasi memasuki pembahasan naskah akademik. Beberapa masukan FMS terhadap draft naskah akademik rancangan qanun tersebut mencakup perlunya ketersediaan data sektor kesehatan seperti jumlah unit layanan, tenaga kesehatan, data terpilah by gender, jumlah pembatras, dan masalah kesehatan reproduksi dan seksualitas yang dialami oleh masyarakat.



FA FMS Banda Aceh

Keterlibatan FMS di Banda Aceh dan Aceh Utara juga sangat membantu dalam melaksanakan Survey Masalah Gizi Perempuan dan Perempuan Muda di Aceh Utara. Mereka aktif dalam menyediakan data, memberikan masukan, dan menjadi penghubung di instansinya masing-masing.

☞ FMS SUMATERA UTARA

Advokasi kebijakan yang dilakukan FMS pada periode ini telah berhasil mendorong terwujudnya beberapa perjanjian kesepakatan terkait pemenuhan kesehatan reproduksi dan seksualitas. Di Kab. Dairi, FMS telah berhasil menyepakati dilaksanakannya Sistem Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan



Pertemuan FMS Humbang Hasundutan - Sumatera Utara

Kesehatan Reproduksi di Puskesmas Batang Beruh dan Puskesmas Gunung Stember Di Kab. Dairi. Anggota FMS terlibat menjadi tim pengelola pengaduan tersebut. Sementara itu di Kab. Nias barat disepakati adanya kerjasama antara Bidan Desa dan Pembatras (Dukun Beranak) mencakup tugas dan tanggungjawab antara bidan desa dan dukun beranak dalam membantu persalinan di 10 desa lokasi program kesehatan perempuan. Dinas Kesehatan Kab. Nias Barat berkewajiban melakukan pengembangan kapasitas dan melakukan monitoring dan evaluasi bersama-sama dengan Pesada.

Pendampingan FMS dilakukan secara rutin di tiap-tiap kabupaten. Di Kab. Humbang Hasundutan diselenggarakan Lokakarya Penguatan FMS Kab. Humbang Hasundutan dengan tema diskusi “Upaya Mencapai Pembangunan Berkelanjutan melalui Implementasi Standar Pelayanan Minimal Puskesmas.” Di Kab. Dairi, pertemuan FMS mendiskusikan pendalaman pengelolaan pengaduan layanan kesehatan di Puskesmas. Sementara itu, FMS Kab. Nias Barat sedang dalam proses menggagas rancangan Peraturan Desa tentang keterlibatan perempuan dalam rapat-rapat desa dan posisi perempuan dalam pengambilan keputusan. Di Kab. Tapanuli Tengah, FMS terlibat dalam dialog warga di Desa Mela 1 dan Desa Mela 2. Dialog warga kali ini mendiskusikan pentingnya upaya-upaya untuk pemenuhan kesehatan perempuan dan masyarakat miskin. Akhir dari dialog warga tersebut disepakati akan dilakukan sosialisasi

tentang bahaya narkoba bagi masyarakat desa demi menghindarkan remaja dari narkoba dan seks bebas.

Proses advokasi FMS yang berlangsung hingga saat ini, adalah FMS di Nias barat terlibat untuk mendorong adanya Sistem Pengaduan Pelayanan Kesehatan di 2 Puskesmas, dan FMS Langkat untuk mendorong rancangan Peraturan Desa tentang perlindungan perempuan korban kekerasan di Desa Suka Maju, Kab. Lagkat.

⌘ FMS RIAU

FMS di Kab. Rokan Hilir terlibat dalam aksi kolektif dengan organisasi perempuan di Kab. Rokan Hilir dalam moment peringatan Hari Perempuan yang berlokasi di area Car Free Day Jl. Merdeka, Kab. Rohil. Aksi kolektif ini diisi dengan acara senam sehat, orasi, teatrikal dan nyanyian Three-End. Aksi kolektif ini bertujuan untuk merefleksikan gerakan perempuan lokal maupun global dalam pemenuhan hak-hak azasi perempuan. Aksi ini mendapat dukungan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Kab. Rokan Hilir.



Penguatan Tokoh Agama dan Tokoh Adat - PPSW Riau

⌘ FMS SUMBAR

Pada triwulan satu tahun 2017 ini, kegiatan Forum Multi-Stakeholders (FMS) dilakukan dalam bentuk audiensi ke dinas/instansi pemerintahan di tiga kabupaten/kota, yaitu Padang, Tanah Datar, dan Padang Pariaman. Di Kota Padang LP2M dan FMS beraudiensi ke Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Padang. Pertemuan ini mendiskusikan tentang rencana tindak lanjut penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwako) tentang perlindungan anak. Ke depan P3AP2KB akan melibatkan LP2M dan FMS dalam

melaksanakan program pemberdayaan perempuan. Di Kab. Padang Pariaman, FMS beraudiensi ke KABID Sosial Budaya, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah serta ke Dinas Kesehatan. Pertemuan dengan Bapelitbangda membahas tentang pentingnya meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan daerah sedangkan dengan Dinas Kesehatan membahas tentang rencana kegiatan bersama dalam rangka pemenuhan hak kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Sementara itu di Kab. Tanah Datar, FMS beraudiensi ke Bapelitbangda, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan, Dinas Kesehatan dan Dinas Koperindag. Pertemuan ini membahas tentang upaya meningkatkan partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan, mengembangkan pemasaran hasil usaha kecil kelompok, dan mendorong adanya peraturan daerah tentang perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tanah Datar.

Pada tanggal 27 April 2017 dilaksanakan pertemuan



FMS Sumatera Barat yang dihadiri perwakilan dari ketiga FMS (Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar). Kegiatan ini menyepakati rencana tindak lanjut yakni mendorong lahirnya Perwako (Peraturan Wali Kota) tentang pembinaan dan perlindungan anak di Kota Padang serta Perna (Peraturan Nagari) tentang perlindungan perempuan dan anak di Nagari Koto Tinggi Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman dan di Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.

Secara sukarela anggota FMS di Kota Padang bersedia melaksanakan pertemuan rutin tanpa harus bergantung pada pembiayaan LP2M. Pada pertemuan kali ini FMS membahas Perda Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan anak. Dari diskusi disimpulkan bahwa terdapat dua bab yakni Bab V tentang

pembinaan dan Bab XI tentang sanksi administratif yang mestinya di buat peraturan operasionalnya kedalam pada Perwako. Beberapa masukan dari FMS terhadap Perwako adalah tentang hak anak dari pernikahan siri, perlunya melibatkan orang tua dalam pendidikan moral anak, mencegah pernikahan anak, memperbanyak ruang untuk pengembangan minat bakat anak, memasukkan materi kesehatan reproduksi dalam kurikulum ekstrakurikuler atau Pesantren Ramadhan, serta memberikan pembinaan kewirausahaan bagi anak.

⌘ FMS JAMBI

FMS bersama FKPAR semakin aktif dalam lobby dan audiensi kepada pihak – pihak pengambil kebijakan baik di tingkat desa maupun Kabupaten seperti Dinas Kesehatan, Bupati maupun OPD lainnya. Di tingkat desa, mereka telah terlibat aktif dalam Musrenbangdes dan RPJMDes untuk mengusulkan dan menyuarakan anggaran untuk kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak terutama di bidang pemberdayaan dan kesehatan. Sementara itu, di tingkat Kabupaten, FMS turut melakukan lobby/audiensi ke instansi terkait untuk mendorong lahirnya kebijakan dan program pemerintah yang mendukung pemenuhan dan perlindungan HKSR.

Dalam kegiatan kampanye publik pemenuhan kesehatan reproduksi, Anggota FMS pun terlibat seperti kegiatan peringatan IWD 2017 dan Gerakan Tes IVA di Kab. Merangin. Sedangkan FMS dari unsur tokoh agama dan adat ikut ambil bagian membantu pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan dan mendiskusikan ulang aturan-aturan adat yang



Diskusi FMS - Merangin

diskriminatif terhadap perempuan seperti denda adat, 'cuci kampung', dan lain-lain.

⌘ FMS BENGKULU

Kegiatan diskusi kritis FMS di tingkat Kab/Kota direncanakan di 3 wilayah program Kab. Seluma, Kab. Rejang Lebong, dan Kota Bengkulu. Namun Kota Bengkulu belum terlaksana dikarenakan proses mutasi sehingga hanya melakukan koordinasi untuk menjelaskan ulang program MAMPU yang berjalan dan kegiatan ini akan diagendakan di triwulan 3.



Diskusi Kritis FMS Kabupaten Seluma

FMS dilibatkan dalam pembahasan rancangan Peraturan Bupati tentang KIBBLARRET (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Anak, Remaja, Kesehatan Reproduksi Terpadu) yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan Kab. Rejang Lebong melalui forum konsultasi publik. Saat ini kertas kebijakan untuk mendukung rancangan Peraturan Bupati tentang KIBBLARRET masih dalam pengerjakan bersama konsultan dari ICJR. Sedangkan di Kab. Seluma, FMS bersama Cahaya Perempuan WCC sedang membahas isi Ranperda Pelayanan Persalinan Pada Fasilitas Kesehatan serta Inisiasi Menyusui Dini agar selaras dengan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan gizi perempuan di Kab. Seluma yang juga merupakan program yang dilaksanakan oleh Cahaya Perempuan WCC bersama Permampu.

⌘ FMS SUMATERA SELATAN

Pada periode ini, pendampingan FMS di Sumatera Selatan dilakukan melalui diskusi berseri dengan anggota FMS di Kab. OKI & Kab. Muara Enim. Dari diskusi ini anggota FMS Kab. OKI & Kab. Muara Enim semakin memahami tujuan, tantangan, dan arah advokasi yang dilakukan oleh FMS. Sharing pengalaman dari anggota FMS Aceh maupun Bengkulu menjadi bahan diskusi untuk menambah wawasan para anggota FMS Kab. OKI & Kab. Muara Enim untuk mulai menyusun arah advokasi untuk masing-masing kabupaten. Secara mandiri, anggota FMS Kab. OKI mulai aktif menjadi focal point di instansinya untuk mengarusutamakan



Kegiatan Lokalatih Kesehatan & Gender Todat, Toga, & Tomas Kampar

isu kesehatan seksualitas dan reproduksi ke dalam kebijakan dan program dinas

⌘ FMS LAMPUNG

Pada periode ini, FMS Lampung banyak terlibat dalam rangkaian kegiatan Survey Masalah Gizi Perempuan dan Perempuan Muda di Lampung Tengah dan Kota Bandar Lampung, seperti audiensi ke Dinas Kesehatan, lokakarya identifikasi masalah, dan lokakarya analisis masalah gizi. Pelibatan FMS dan masyarakat terutama perempuan dalam survey sangat penting, karena survey ini merupakan riset aksi, yang akan dilanjutkan dengan proses advokasi untuk mendukung terjadinya perbaikan pelayanan terkait kesehatan gizi oleh Puskesmas. Selain itu juga, advokasi juga diarahkan untuk menghasilkan kebijakan daerah yang mendukung pemenuhan hak gizi masyarakat terutama perempuan dan anak-anak.

Puskesmas adalah layanan primer/dasar memiliki peran penting mengatasi persoalan kekurangan gizi secara langsung tetapi penetapan kebijakan dan penganggaran adalah merupakan kewenangan Dinas Kesehatan. Oleh karena itu pada saat pertemuan awal pada sesi pertemuan Forum Multi Stakeholder di Bandar Lampung dan Lampung Tengah, ditekankan pentingnya advokasi ke Dinas Kesehatan agar dapat menyusun program yang lebih responsive terhadap persoalan gizi, dan juga mendorong munculnya kebijakan yang lebih strategis di tingkat kabupaten/kota (berupa peraturan bupati/walikota/perda) untuk mengatasi persoalan yang lebih mendasar dari masalah gizi ini.

Forum telah mematangkan hal apa saja yang harus segera dilakukan bersama dan akan menentukan

waktu bertemu dengan Bupati dan DPRD untuk melakukan audiensi terkait SK FMS sehingga SK dapat segera diterbitkan.

FMS Kabupaten Lampung Tengah juga telah menyepakati akan saling bersinergi untuk mendorong kebijakan mengenai visum gratis yang dikeluarkan oleh pemerintah. Rencana tindak lanjut kedua forum ini, Peningkatan kapasitas pada masing-masing stakeholder (anggota FMS) terkait tugas dan peran serta Membuat media untuk mempermudah komunikasi antar stakeholder. ■



Audiensi ke Bupati Lampung Tengah

CERITA PERUBAHAN



Credit: women empowerment symbol-internet

Aku terkuatkan

Ditulis oleh Sutiyem, Staf Lapang APM Jambi

Nama saya Eti Suwarti. Saya sudah mengalami beberapa perubahan yang positif sebagai hasil dari program HKSR Aliansi Perempuan Merangin sebagai anggota konsorsium Permampu. Tetapi bagi saya perubahan yang paling mendasar adalah menguatnya rasa percaya diri dalam menghadapi dan melanjutkan kehidupan setelah mengalami keterpurukan dan kekerasan dalam hidup saya.

Saya berasal dari Desa Mampun Baru, Kecamatan Pamenang Barat, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi. Umur saya 42 tahun, merupakan orang tua tunggal dari 2 orang anak yang mulai menginjak remaja. Suami saya pergi entah kemana sejak 6 tahun yang lalu dan tidak pernah pulang hingga sekarang. Anak sulung saya laki – laki telah lulus SLTA dan anak kedua saya seorang remaja putri yang saat ini duduk di kelas 2 SLTP. Sejak tahun 2015 saya merupakan penerima manfaat dari Program Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi /HKSR yang difasilitasi oleh APM. Saya menjadi anggota Community Center Lentera Hati yang merupakan salah satu kelompok dampingan APM. Selain diskusi di CC.Lentera hati, saya banyak mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas yang diadakan oleh APM. Diantaranya :

- Pelatihan penyusunan Perdes
- Pelatihan penguatan Ekonomi Perempuan
- Diskusi reguler FKPAR Propinsi Jambi
- Perayaan dan Konsolidasi FKPAR Dampingan Permampu di Riau
- Lokalatih persiapan tim peneliti
- Berbagai Seminar Isu kesehatan dan perempuan

Pada awalnya saya menjadi peserta kegiatan peningkatan kapasitas dan diskusi yang diadakan APM mewakili dari kelompok CC.Lentera Hari yang ada di desa Mampun Baru. Dari banyak kegiatan yang saya

ikuti di APM, membuat kemampuan saya bertambah baik di bidang pengkaderan. Terutama cara saya memandang dan menghadapi suatu permasalahan, cara berbicara di depan orang banyak dan bagaimana menyatukan kekuatan suara perempuan untuk menyuarakan kepentingan perempuan. baik untuk dilingkungan terkecil di tingkat dusun, desa, kecamatan, kabupaten atau bahkan propinsi dan tingkat nasional. Selain karena pelatihan dan diskusi yang saya ikuti di APM, kemampuan ini juga saya peroleh dengan mengikuti kegiatan lobi dan audiensi ke dinas terkait, pemda maupun mitra – mitra APM lainnya. Saya juga di percaya menjadi pengurus FKPAR propinsi Jambi dari Kabupaten Merangin. Wawasan



saya Semakin bertambah luas disaat mendapat kesempatan mengikuti kegiatan FKPAR tingkat sesumatra dipropinsi Riau dan di libatkan dalam kegiatan Survey Persoalan Pemenuhan Gizi Perempuan dan perempuan Muda di Jambi.

Pengetahuan dan pembelajaran yang saya peroleh di APM saya bagikan kepada perempuan lain yang ada didesa saya, baik melalui CC. Lentera Hati, PKK desa, kader Posyandu, dan dipertemuan kelompok [perempuan tingkat dusun. Saya mengajak mereka untuk menjadi perempuan yang berdaya, memiliki sikap positif, dan saling menguatkan satu sama lainnya.

Dengan saya bergabung di APM dalam program HKSR ini saya menjadi perempuan yang lebih percaya diri, sehingga terkuatkan dan mampu menghadapi persoalan yang selama ini saya hadapi. karena besarnya dukungan moril dan kepedulian yang di berikan oleh kawan – kawan serta berbagai kesempatan yang di berikan APM kepada saya untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman yang begitu luas sehingga saya mampu bangkit dan berjuang bersama perempuan lain untuk menata kehidupan yang jauh lebih baik.

Nara Sumber : Eti Suwarti

Usia : 42 Tahun

Tanggal cerita ditulis : 3 Juli 2017

Ilmu Memotivasiku untuk Lebih Higienis

Oleh: Lilis Suryani (Teraphis Rumah Sehat Flower Aceh)

Namanya Salmiyati, anak pertama dari 4 bersaudara, tempat dan tanggal lahir Aceh Jaya 7 September 1966. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA Ibu Salmiyati yang akrab dipanggil Kak Mi alias Kak Mi Urut langsung berumah tangga. Kak Mi sosok yang tidak banyak bicara tapi pintar, tegas dalam hal apa saja, namun tetap lembut dan murah senyum. Kak Mi adalah sosok yang sangat peduli dengan tetangga dan sesama anggota Pembatra lainnya. Kak Mi yang sekarang tinggal di kawasan Blang Oi, lorong 1, Kec. Meuraxa, Banda Aceh ini bersyukur sekali dengan mendapatkan suami yang penuh pengertian, sayang sama keluarga dan bertanggungjawab. Keberhasilan Kak Mi ini tidak terlepas dari dukungan keluarga dan suami tercinta, Kaharrullah. Kak Mi sudah dikaruniai empat orang anak, dua orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Kak Mi mulai bergabung



Lilis Suryani

menjadi anggota dampingan Flower Aceh sejak tahun 2016, sebagai anggota kelompok Pembatra. Selama bergabung dalam kelompok banyak ilmu yang Kak Mi dapatkan, yang selama ini tidak pernah didapatkan dari tempat lain. Kalau ada diskusi di Flower Aceh mengenai kesehatan reproduksi Kak Mi selalu hadir dan selalu mengambil kesempatan untuk bertanya dan mengemukakan pendapat, juga memberi masukan maupun motivasi bagi Pembatra lainnya. Kak Mi juga berbagi ilmu atau cara-cara pembuatan obat herbal. Ilmu yang Kak Mi dapatkan selalu dibagikan untuk orang lain, seperti yang pernah disampaikannya langsung “ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dapat berguna bagi orang lain”. Banyak perubahan yang dirasakan selama bergabung dengan Flower seperti, yang dulunya tidak begitu memperhatikan ke-higienis-an dalam pembuatan obat-obat herbal dan menangani pasien, sekarang

justru sangat diutamakan dalam pembuatan obat-obat herbal yang diraciknya. Tidak hanya itu saja, Kak Mi juga turut menganjurkan kepada masyarakat dan teman-teman perempuannya untuk segera melakukan papsmear, karena selain untuk menjaga alat reproduksi, papsmear sangat penting bagi perempuan yang sudah mencapai umur 40 tahun keatas. Banyak jenis tanaman obat herbal yang bisa digunakan yang ada disekitar kita, itu semua karena pengalaman dan pendidikan yang didapatkan selama ini.

Apa lagi dalam penanganan pasien, yang sebelumnya tidak memakai masker dan sarung tangan, sekarang sangat diperhatikan oleh Kak Mi. Perempuan 50 tahun ini juga dulunya tidak berani bicara dalam forum-forum dimasyarakat, namun sekarang Kak Mi tidak takut dan malu-malu lagi

kalau ingin menyampaikan sesuatu didepan publik. Dengan kehidupan yang serba modern sekarang ini Kak Mi tetap memakai obat herbal tradisional untuk pencegahan dan penyembuhan khusus jenis penyakit-penyakit yang ringan, tidak hanya untuk keluarganya saja, namun anjuran ini juga untuk pasien-pasiennya. teman yang tinggal dekat dengan rumah kami tidak mempersoalkan bentuk relasi yang kami jalani dalam rumah tangga karena melihat langsung apa yang kami lakukan sehari-hari bukan sebagai bentuk ‘penindasan kepada suami’ tetapi memang untuk kebaikan dalam rumah tangga. Tetapi ada juga teman dan keluarga yang tinggal jauh, mempersoalkan hal tersebut, mereka menganggap sebagai hal yang aneh, tidak wajar.

Banda Aceh, 1 Juli 2017

Ketika Kesadaran itu Sudah Muncul

Ditulis Oleh : Ramida Katharina Sinaga - Manager Program Pesada

Laki-laki pasti maunya menang sendiri. Sama seperti saya, saya maunya dilayani, selalu didengar dan menjadi kebanggaan keluarga. Tetapi setelah mengikuti beberapa kegiatan yang dilakukan Pesada, pengetahuan saya berubah, kesadaran hingga perilaku saya. Sekarang saya mulai mau membantu pekerjaan istri di rumah. Saya mulai sadar, di saat istri saya sibuk mencuci piring, saya segera menyapu rumah. Begitu cerita yang keluar dari Pak Jonri Brutu (40 tahun), ketika ditanya perubahan apa yang terjadi setelah mengenal Pesada setahun terakhir ini.



ide, memberi masukan, dari konselor, dari FMS, agar menyelesaikan kasus dengan mendengarkan keinginan korban. Orang-orang yang mendengar kasus ini ditangani Pesada, sudah mulai takut. Jadi harapannya akan memberi efek jera”. (catatan: saat ini Pesada sedang menangani kasus anak perempuan yang diperkosa berulang oleh Pamannya, dan oleh Tokoh Masyarakat dinikahkan dengan laki-laki lain).

Semoga semakin banyak Tokoh Agama dan Tokoh Adat yang mengalami perubahan, menjadi penolong dan pendukung bagi perempuan-perempuan yang mengalami kekerasan. (RKS)

Pengalaman di keluarga Pak Jonri Brutu sebagai bagian dari masyarakat Pakpak, yaitu suku asli di kabupaten Dairi, tidaklah umum; karena sebagaimana suku yang menggunakan sistim marga dan patriline (garis lelaki) lainnya, Pakpak selalu mendahulukan anak laki-laki.

Ketika mulai bergabung dalam FMS (Forum Multi Stakeholder), kesadaran Pak Jonri Brutu untuk menghargai perempuan mulai terbangun. Perilaku Pak Jonri menurut pengakuannya, menjadi lebih mendahulukan anak perempuan. Begitu juga ketika berinteraksi dengan lingkungan, baik di bidang keagamaan (Pak Jonri adalah Sintua atau Penatua GKPPD, Gereja Suku Pakpak) maupun di masyarakat; perempuan menjadi lebih disapa dengan hormat. Melihat ibu-ibu membawa beban dari ladangpun, secara spontan dia membantu. Kalau laki-laki, tidak ‘diopeni’ (maksudnya, tidak perlu dibantu), katanya sambil senyum tipis...

Pak Jonri Brutu juga mulai berani terlibat dalam penanganan kasus pelanggaran HKSR. Karena sering sekali, hanya karena alasan ‘daripada malu satu kampung’, mengawinkan perempuan hamil di luar nikah dianggap solusi terbaik. Bahkan mengawinkan anak perempuanpun, terjadi. “ Kami [tokoh adat] mencoba memberi

GALERI FOTO



Diskusi Persiapan Penelitian Pemenuhan Gizi



Kunjungan Belajar ke PUSKESMAS Tebet Timur
Dalam



Diskusi OSS&L di kantor MAMPU



Training Media Handling



Pendidikan Pedoman Perilaku Permampu

Visi Konsorsium PERMAMPU:

Perempuan mengalami & menikmati pemenuhan perlindungan dan penghormatan Hak Kesehatan Seksual & Reproduksi (HKSR) yang lebih baik

TUJUAN 1:

Perempuan akar rumput (pedesaan, miskin kota, muda /12-20 tahun) mempunyai kekuatan kolektif dan kekuatan ekonomi untuk pemenuhan HKSR

TUJUAN 2:

Perempuan mendapatkan kemudahan akses dalam layanan HKSR yang mudah, cepat, tepat dan bermutu – PUSKESMAS/RS

TUJUAN 3 :

Institusi keluarga, adat dan agama melakukan perubahan aturan adat dan tafsir agama terkait HKSR (FMS)

TUJUAN 4:

Pemerintah desa dan kab/kota membuat kebijakan untuk pemenuhan dan perlindungan HKSR

Struktur Kerja Konsorsium PERMAMPU:

Koord. Pelaksana : Dina Lumbantobing

Lembaga Host : PESADA - CP: Ramida Katharina Sinaga, GM: Elpina Sipayung

Pengurus : Lusi Herlina (LP2M – SUMBAR), Siti Noor Laila (Damar-Lampung)

Pengawas : Hefi Rahmawati (FBCB Sumatera), Khairani Arifin (Flower Aceh)



WILAYAH CAKUPAN PROGRAM PERMAMPU



Sekretariat PERMAMPU

Jl. Letjen. Jamin Ginting KM 8 No.282 Padang Bulan, Medan 20141 - Sumatera Utara

Telp/Fax. 061-8361102 | e-mail: konsorsiumpermampu@gmail.com

www.permampu.org | Facebook: PermampuConsortium

